

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM ATAS PEMBATALAN
PUTUSAN BPSK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
(Studi pada Putusan PN Batam Nomor 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Btm)**

Oleh

***ANNISA AMELIA PUTRI
2105040055***

ABSTRAK

Pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) oleh Pengadilan Negeri (PN) dalam penyelesaian sengketa konsumen, seperti yang terjadi dalam Putusan PN Batam Nomor 418/PDT.SUS-BPSK/2024/PN BTM, dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasarinya, memiliki beberapa alasan yaitu Putusan BPSK harus didasarkan pada bukti-bukti yang cukup dan relevan. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya kepastian hukum bagi konsumen, melemahkan asas final dan mengikat putusan BPSK, serta berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara BPSK dan pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa konsumen. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis Pertimbangan Hakim atas Pembatalan Putusan BPSK dalam Penyelesaian Sengketa (Studi pada Putusan PN Batam Nomor 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Btm). Metode Penelitian yang penulis gunakan ialah Pendekatan yuridis normatif digunakan dengan menelaah dokumen putusan, peraturan perundang-undangan yang relevan, serta literatur hukum untuk menilai kesesuaian dan alasan pertimbangan hakim. Hasil penelitian ini ialah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Btm menunjukkan bahwa pertimbangan hakim lebih mengutamakan aspek formil yuridis dan asas kebebasan berkontrak dalam PPJB, sehingga membatalkan putusan BPSK Kota Batam Nomor 014/PK-ARB/BPSK/VIII/2024 yang bersifat final dan mengikat sesuai Pasal 56 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan ini mengabaikan posisi lemah konsumen dalam perjanjian baku properti, di mana PPJB sering disusun sepihak oleh developer, serta melampaui fungsi pengawasan pengadilan yang seharusnya terbatas pada prosedur dan kewenangan BPSK. Akibatnya, pengabaian tenggang waktu 14 hari pengajuan keberatan, pelanggaran due process of law dalam penunjukan arbiter, dan prioritas klausul mediasi PPJB melemahkan eksistensi BPSK sebagai mekanisme cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, sebagaimana dikonfirmasi wawancara informan BPSK Provinsi Kepulauan Riau.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pembatasan Putusan, Sengketa

**ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDERATIONS ON THE CANCELLATION
OF BPSK DECISIONS IN DISPUTE RESOLUTION
(A Study of Batam District Court Decision No. 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN
BTM)**

By

**ANNISA AMELIA PUTRI
2105040055**

ABSTRACT

The District Court's (PN) annulment of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) decision in consumer dispute resolution, as occurred in Batam District Court Decision No. 418/PDT.SUS-BPSK/2024/PN BTM, can be caused by several underlying factors. These include: BPSK decisions must be based on sufficient and relevant evidence. If a decision is made without a strong evidentiary basis or based solely on assumptions, the District Court may annul it. Furthermore, the BPSK's lack of authority arises if the BPSK handles a dispute that is actually outside its jurisdiction. The purpose of this study is to determine the analysis of the Judge's Consideration on the Cancellation of the BPSK Decision in Dispute Settlement (Study on the Batam District Court Decision Number 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Btm). The research method used by the author is a normative juridical approach used by reviewing decision documents, relevant laws and regulations, and legal literature to assess the suitability and reasons for the judge's considerations. The results of this study are that the Batam District Court Decision Number 418/Pdt.Sus-BPSK/2024/PN Btm shows that the judge's considerations prioritize the formal legal aspects and the principle of freedom of contract in the PPJB, thus canceling the Batam City BPSK Decision Number 014/PK-ARB/BPSK/VIII/2024 which is final and binding according to Article 56 paragraph (1) of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This approach ignores the weak position of consumers in standard property contracts, where the PPJB is often unilaterally drafted by the developer, and goes beyond the court's oversight function, which should be limited to the procedures and authority of the BPSK. Consequently, the disregard for the 14-day objection deadline, the violation of due process of law in appointing arbitrators, and the prioritization of the PPJB mediation clause undermine the BPSK's role as a fast, simple, and low-cost mechanism, as confirmed by interviews with BPSK informants in the Kepulauan Riau Province.

Keywords: Judge's Considerations, Limitation of Decisions, Dispute